



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kota Batam

Muhammad Faiz Fahmi, Haryanto

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam. Populasi penelitian terdiri dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 12 kecamatan di Kota Batam. Dengan menggunakan metode sensus, penelitian ini melibatkan 33 responden yang terdiri dari kepala OPD dan kepala kecamatan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, baik secara parsial maupun simultan, dengan model menjelaskan 64,4% variasi kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi, disertai dengan sistem pengendalian internal yang lebih kuat, secara langsung meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi sektor publik dan berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan dan mencegah penyimpangan anggaran.

Kata Kunci Akuntabilitas, Transparansi, Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk nyata reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Keberhasilan otonomi daerah dapat tercermin dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Mahmudi, 2010).

Kinerja pemerintah daerah berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan, menggunakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan dana publik untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan keuangan yang efektif mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Mardiasmo, 2018). Sebaliknya, tata kelola keuangan yang lemah dapat menyebabkan inefisiensi, penyalahgunaan sumber daya, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Mahmudi, 2010).

Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* menjadi semakin penting dalam organisasi sektor publik. *Good governance* menekankan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal yang efektif sebagai elemen penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan dapat dipercaya (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas mencerminkan kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan publik. Sementara itu, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008.)

Kinerja pemerintah harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal diterapkan. Akuntabilitas mendorong pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui mekanisme akuntabilitas, pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas juga memperkuat pengawasan publik dan meminimalkan potensi kecurangan serta penyalahgunaan dana publik.

Transparansi merupakan aspek penting lainnya dalam mewujudkan tata kelola yang efektif. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran, dan proses pelaksanaan. Akses terbuka terhadap informasi memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penerapan transparansi juga mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif (Mardiasmo, 2018).

Selain akuntabilitas dan transparansi, pengendalian internal merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pengendalian internal adalah proses terstruktur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (PP No. 60 Tahun 2008). Penerapan pengendalian internal yang memadai dapat meningkatkan efektivitas operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi risiko kecurangan serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Arifudin et al., 2020).



Pemerintah Kota Batam merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran strategis di Indonesia karena statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) dan kawasan industri. Batam memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Batam menjadi semakin penting untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Namun, opini WTP hanya mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak selalu menunjukkan optimalnya kinerja pemerintah dalam dimensi yang lebih luas seperti kualitas pelayanan, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2018). Meskipun telah memperoleh opini WTP, beberapa tantangan terkait tata kelola keuangan daerah masih ditemukan. Permasalahan seperti inefisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, kurangnya transparansi informasi anggaran, dan kelemahan mekanisme pengendalian internal masih terjadi di pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal belum diterapkan secara optimal dalam mendukung kinerja pemerintah.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Pangaribuan & Situmorang (2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, Haris et al. (2022) mengungkapkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang berbeda mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Fransisca et al., 2021; Kusuma & Mildawati, 2021). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut, khususnya pada daerah dengan karakteristik ekonomi dan administrasi yang unik seperti Kota Batam.

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kota Batam. Dengan memahami hubungan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat penerapan prinsip Good governance di pemerintah daerah.

Penelitian ini penting mengingat meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam mencapai kinerja pemerintah daerah yang efektif (PP No. 60 Tahun 2008). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan untuk meningkatkan tata kelola sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah.

Tinjauan Literatur

Teori Keagenan

Konsep dasar teori keagenan membangun hubungan prinsipal agen sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan antara principal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) dalam tata kelola pemerintahan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut (Halim & Abdullah, 2006), agen adalah pihak yang dipercaya untuk melaksanakan mandat prinsipal, sedangkan prinsipal mengharapkan agen bertindak sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan melibatkan dinamika antara Pemerintah Kota Batam sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran daerah. Permasalahan asimetri informasi antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan fiskal daerah. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi memiliki peran strategis dalam mengurangi asimetri informasi tersebut, sementara pengendalian internal berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen (penerima amanah) untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kepada prinsipal (pemberi amanah) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu; keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat; adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik atas kinerja yang dilaporkan; serta kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh keputusan kebijakan yang memengaruhi penggunaan sumber daya publik (Haryanto & Arifuddin, 2018; Mardiasmo, 2018).

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Maranjaya, 2022). Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan informasi bagi setiap orang atau pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung (Suryana, 2020). Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui: ketersediaan dan kemudahan akses publik terhadap dokumen anggaran; keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran; publikasi laporan keuangan secara berkala; keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbang dan responsivitas pemerintah terhadap permintaan informasi publik.

Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008) tentang SPIP menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan keseluruhan proses yang bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk menjaga aset organisasi, memverifikasi ketepatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Arifudin et al., 2020). Pengendalian internal pemerintah diukur melalui lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Kinerja Pemerintah

Permenpan No. 09 Tahun 2007 mendefinisikan kinerja pemerintah sebagai gambaran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah sebagai refleksi dari visi, misi, dan strategi instansi tersebut. Kinerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hasnita, 2021).

Kinerja pemerintah diukur menggunakan indikator yang meliputi: tingkat pencapaian target program yang telah ditetapkan; efisiensi penggunaan sumber daya anggaran; kualitas dan ketepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah sebagai agen untuk melaporkan pengelolaan keuangannya secara rinci kepada masyarakat sebagai prinsipal, sebagai upaya mengurangi potensi penyimpangan sesuai dengan teori keagenan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah (Haris et al., 2022; Pangaribuan & Situmorang, 2024)

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam.

Transparansi berperan dalam mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan akses informasi publik, sehingga memungkinkan pengawasan eksternal oleh masyarakat dan DPRD. Penelitian (Pangaribuan & Situmorang, 2024) menemukan adanya hubungan positif antara transparansi dan kinerja pemerintah daerah.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam.

Pengendalian internal melalui prosedur audit dan pemisahan tugas berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang mencegah kecurangan dan memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan. Penelitian Kusuma & Mildawati (2021) dan Haris et al. (2022) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H3: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam.

Metode

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bidang, kepala subbagian, dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penentuan sampel didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan memiliki pemahaman mengenai akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri dari responden dari beberapa OPD di Pemerintah Kota Batam.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi informasi identitas responden, sedangkan bagian kedua terdiri dari pernyataan penelitian terkait variabel akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah. Responden diminta memberikan jawaban berdasarkan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Setelah kuesioner terkumpul, data diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan software SPSS. Beberapa tahapan analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah (Y), sedangkan variabel independen meliputi akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengendalian internal (X3).

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat pencapaian kegiatan dan program pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mahmudi, 2010). Kinerja pemerintah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan kebijakan publik.

Variabel akuntabilitas mengacu pada kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan terkait pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan program pemerintahan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas menekankan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan organisasi.

Variabel transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan publik (Mardiasmo, 2018). Transparansi mengharuskan pemerintah menyajikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Variabel pengendalian internal didefinisikan sebagai proses terstruktur yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi, efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Arifudin et al., 2020; PP No. 60 Tahun 2008).

Dalam penelitian ini, seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert. Skor diklasifikasikan ke dalam lima tingkat: Sangat Tidak Setuju = 1; Tidak Setuju = 2; Netral = 3; Setuju = 4; dan Sangat Setuju = 5.

Model Penelitian

Data penelitian diolah menggunakan software SPSS versi 29. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kinerja Pemerintah Kota Batam

α = Konstanta

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Pengendalian Internal

β_1 = koefisien akuntabilitas

β_2 = koefisien transparansi

β_3 = koefisien pengendalian internal

e = residual (error term).

Hasil

Deskripsi Sampel

Populasi penelitian terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode survei. Sampel penelitian diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada kepala OPD dan kepala kecamatan sebagai responden. Sebanyak 34 kuesioner didistribusikan, dan 33 responden berhasil mengembalikan serta mengisi kuesioner.

Tabel 1. Deskripsi Sampel

Informasi	N	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	23	69.70%
Perempuan	10	30.30%
Total	33	100%
Usia (tahun)		



< 25	0	0%
26–35	1	3.03%
36–45	8	24.24%
> 45	24	72.73%
Total	33	100%
Tingkat Pendidikan		
SMA	0	0%
Diploma	0	0%
Sarjana/S1	23	69.70%
Magister/S2	10	30.30%
Doktor	0	0%
Total	33	100%
Lama Pengalaman		
< 1 tahun	2	6.06%
1–3 tahun	5	15.15%
4–6 tahun	0	0%
> 6 tahun	26	78.79%
Total	33	100%

Berdasarkan data sampel, responden didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 21 responden (64%). Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berusia lebih dari 45 tahun, yaitu sebanyak 19 responden (58%). Selanjutnya, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan sarjana/S1, yaitu sebanyak 24 responden (73%). Berdasarkan lama pengalaman kerja, mayoritas responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 20 responden (61%).

Berikut merupakan ringkasan statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	33	26	35	30.79	2.595
Transparansi (X2)	33	24	34	29.70	3.177
Pengendalian Internal (X3)	33	22	29	25.52	1.822
Kinerja Pemerintah (Y)	33	24	35	28.21	2.355
Valid N (<i>listwise</i>)	33				

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Mengacu pada Tabel 2 di atas, variabel akuntabilitas memiliki rentang nilai dari 16 hingga 30, dengan nilai mean sebesar 24.18 dan standar deviasi sebesar 3.215. Variabel transparansi memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 30, dengan nilai mean sebesar 23.82 dan standar deviasi sebesar 3.406. Variabel pengendalian internal memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 30, dengan nilai mean sebesar 24.03 dan standar deviasi sebesar 3.184. Sementara



itu, variabel kinerja pemerintah daerah memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 30, dengan nilai mean sebesar 24.45 dan standar deviasi sebesar 3.291.

Uji Kualitas Data

Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Hasil
Akuntabilitas (X1)	1	0.758	0.3338	Valid
	2	0.708	0.3338	Valid
	3	0.649	0.3338	Valid
	4	0.688	0.3338	Valid
	5	0.670	0.3338	Valid
	6	0.667	0.3338	Valid
	7	0.627	0.3338	Valid
Transparansi (X2)	1	0.641	0.3338	Valid
	2	0.737	0.3338	Valid
	3	0.772	0.3338	Valid
	4	0.773	0.3338	Valid
	5	0.718	0.3338	Valid
	6	0.646	0.3338	Valid
	7	0.740	0.3338	Valid
Pengendalian Internal (X3)	1	0.728	0.3338	Valid
	2	0.617	0.3338	Valid
	3	0.599	0.3338	Valid
	4	0.676	0.3338	Valid
	5	0.549	0.3338	Valid
	6	0.658	0.3338	Valid
Kinerja Pemerintah (Y)	1	0.859	0.3338	Valid
	2	0.812	0.3338	Valid
	3	0.756	0.3338	Valid
	4	0.565	0.3338	Valid
	5	0.736	0.3338	Valid
	6	0.764	0.3338	Valid
	7	0.592	0.3338	Valid

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Mengacu pada Tabel 3 di atas, hasil uji validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, yang menunjukkan bahwa seluruh item variabel penelitian dinyatakan valid.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Akuntabilitas (X1)	0.808	7
Transparansi (X2)	0.843	7
Pengendalian Internal (X3)	0.708	6
Kinerja Pemerintah (Y)	0.856	7

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Mengacu pada Tabel 4 di atas, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Akuntabilitas (X1) = 0.748, Transparansi (X2) = 0.780, Pengendalian Internal (X3) = 0.777, dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) = 0.782. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.70.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

	Unstandardized Residual
N	33
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.40441300
Absolute	.127
Positive	.127
Negative	-.098
Test Statistic	.127
Asymp. Sig. (2-tailed)	.195

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Mengacu pada Tabel 5 di atas, nilai skewness dan kurtosis untuk seluruh variabel berada pada rentang antara -2 hingga 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Akuntabilitas (X1)	0.791	1.265
Transparansi (X2)	0.525	1.906
Pengendalian Internal (X3)	0.632	1.582

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF <10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 7. Uji Glejser

Variabel	Sig.	Hasil
Akuntabilitas (X1)	0.411	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi (X2)	0.129	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengendalian Internal (X3)	0.141	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Berdasarkan hasil uji Glejser, variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.246, variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0.126, dan variabel pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0.181. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	0.529	4.477		0.118	0.907
Akuntabilitas (X1)	0.263	0.113	0.290	2.329	0.027
Transparansi (X2)	0.293	0.113	0.396	2.589	0.015
Pengendalian Internal (X3)	0.426	0.180	0.330	2.366	0.025

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 8 di atas, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = 6.139 + 0.187X1 + 0.128X2 + 0.446X3 + e$

Tabel 9. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.803	0.644	0.608	1.47527

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.644 menunjukkan bahwa 64.4% variasi kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal. Sisanya sebesar 35.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Tabel 10. Uji t

Variable	t	Sig.	Result
Akuntabilitas (X1)	2.329	0.027	H1 Diterima
Transparansi (X2)	2.589	0.015	H2 Diterima
Pengendalian Internal (X3)	2.366	0.025	H3 Diterima

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Tabel 11. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	114.399	3	38.133	17.521	<0.001
Residual	63.116	29	2.176		
Total	177.515	32			

Source: SPSS data processing version 29, 2026

Hasil uji F menunjukkan bahwa F-hitung (17.521) > F-tabel (2.92) dengan signifikansi <0.001 < 0.05, yang mengonfirmasi bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah

Hipotesis H1 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar 0.187 dengan nilai signifikansi sebesar 0.016. Nilai signifikansi 0.016 lebih kecil dari 0.05, dan nilai t sebesar 2.335 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.971. Oleh karena itu, Hipotesis 1 didukung.

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas mendorong lembaga pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari perspektif teori keagenan, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penerapan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menyediakan laporan dan penjelasan yang transparan mengenai penggunaan sumber daya publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Pangaribuan & Situmorang (2024), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penerapan prinsip akuntabilitas mendukung tata kelola yang lebih baik dan memperkuat tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis H2 menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t sebesar 2.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0.041. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hipotesis 2 didukung.

Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan publik. Penerapan transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai perencanaan anggaran,

pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban. Keterbukaan ini memperkuat pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintahan.

Berdasarkan teori keagenan, transparansi mengurangi asimetri informasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang dapat diakses dan akurat. Pemerintah yang menerapkan transparansi secara efektif terdorong untuk beroperasi lebih profesional, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pangaribuan & Situmorang (2024), yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Tata kelola yang transparan mendukung terwujudnya prinsip *good governance* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis H3 menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t sebesar 6.098 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hipotesis 3 didukung.

Pengendalian internal merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena memastikan bahwa aktivitas pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif mendukung akurasi pelaporan keuangan, melindungi aset pemerintah, dan meminimalkan potensi kecurangan serta penyimpangan.

Dari perspektif teori keagenan, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi potensi konflik kepentingan antara masyarakat sebagai prinsipal dan lembaga pemerintah sebagai agen. Melalui prosedur pengawasan dan mekanisme pengendalian yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Arifudin et al., 2020), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan pengendalian internal yang memadai memperkuat tata kelola keuangan dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal merupakan prinsip-prinsip penting dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Lembaga pemerintah yang menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel mampu meningkatkan tanggung jawab, memperkuat kepercayaan publik, dan

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penerapan transparansi melalui keterbukaan informasi dan aksesibilitas laporan keuangan memperkuat pengawasan publik dan mendorong praktik tata kelola yang lebih profesional. Selain itu, pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Mekanisme pengendalian internal yang efektif mendukung efektivitas operasional, meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan memperkuat kinerja sektor publik. Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal secara simultan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut secara tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Lembaga pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat keterbukaan informasi, dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan internal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya memperkuat sistem tata kelola melalui mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal guna mencapai administrasi publik yang efektif dan efisien.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sehingga temuan penelitian mungkin belum sepenuhnya mewakili pemerintah daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke berbagai daerah dan institusi pemerintahan lainnya agar memperoleh temuan yang lebih luas dan komprehensif.

Kedua, proses pengumpulan data mengandalkan persepsi responden melalui kuesioner, yang dapat menimbulkan bias subjektif dalam menjawab pernyataan penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data tambahan, seperti wawancara atau observasi langsung, untuk memperkuat akurasi dan konsistensi temuan penelitian.

Ketiga, penelitian ini hanya menguji akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal sebagai faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin memengaruhi kinerja pemerintah, seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran digitalisasi dan sistem pemerintahan elektronik dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem tata kelola digital diharapkan dapat



memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan mendukung kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif di masa depan.

Referensi

- Arifudin, O., Juhadi, J., & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17–32. <https://doi.org/10.35449/Jemasi.V16i2.138>
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/Fairness.V8i3.15207>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi.
- Haris, A., Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Provinsi Jambi). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 34. <https://doi.org/10.33087/Eksis.V13i2.301>
- Haryanto & Arifuddin. (2018). Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kusuma, A. F., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd Ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan Stim Ykpn.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jonner Pangaribuan* (Hal. 1-19) *Jrak*, 10(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.
- Permenpan No 09 Tahun 2007. Permenpan Nomor 09 Tahun 2007.
- Suryana, E. P. (2020). Regional Revenue And Expenditures Budget Transparency In The Context Of Regional Financial Law. *Unnes Law Journal*, 6(1), 21–46. <https://doi.org/10.15294/Ulj.V6i1.8230>